

# Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Nur Inzana<sup>1\*</sup>, Andy Arya Maulana<sup>2</sup>, Putri Mawang Sari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton; [nurinzanaumbuton@gmail.com](mailto:nurinzanaumbuton@gmail.com), [andyaryamw@gmail.com](mailto:andyaryamw@gmail.com), [putrimaret2018@gmail.com](mailto:putrimaret2018@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi dan tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan umum, dengan fokus pada pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *Online Research Methodology* (ORM) dengan memanfaatkan mesin pencari Google dan perangkat lunak analisis kualitatif Nvivo 12 Plus untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait penggunaan Sirekap dalam pemilihan umum di Indonesia. Temuan utama penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun Sirekap menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk kecurigaan terhadap integritas data, keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman atau pelatihan, dan akses publik yang terbatas. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui pengembangan inovasi dalam Sirekap, peningkatan akses teknologi, pendidikan politik yang lebih luas, dan upaya untuk memastikan bahwa informasi politik tersedia secara merata bagi semua warga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran Sirekap dalam proses pemilihan umum di Indonesia dan menekankan urgensi untuk menjaga transparansi, akurasi, dan partisipasi politik yang inklusif dalam sistem demokratis.

**Katakunci:** Sirekap; Pemilu; Partisipasi Politik; Sistem Demokrasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.106>

\*Correspondensi: Nur Inzana

Email: [nurinzanaumbuton@gmail.com](mailto:nurinzanaumbuton@gmail.com)

Received: 03-05-2024

Accepted: 14-07-2024

Published: 27-08-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research aims to explore the urgency and challenges in implementing the Recapitulation Information System (Sirekap) in general elections, with a focus on the 2024 elections in Indonesia. The study employs *Online Research Methodology* (ORM) utilizing Google search engine and Nvivo 12 Plus qualitative analysis software to gather and analyze data related to the usage of Sirekap in general elections in Indonesia. The main findings of this research identify that while Sirekap offers the potential to enhance transparency and accuracy, its implementation still faces several challenges, including suspicion regarding data integrity, technological limitations, lack of understanding or training, and limited public access. The research highlights the importance of addressing these challenges through the development of innovations in Sirekap, enhancing technological access, broader political education, and efforts to ensure that political information is equally available to all citizens. Thus, this research provides a significant contribution to understanding the role of Sirekap in the electoral process in Indonesia and emphasizes the urgency of maintaining transparency, accuracy, and inclusive political participation in the democratic system.

**Keywords:** Sirekap; Elections; Political Participation; Democratic System

## Pendahuluan

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu dalam proses politik, baik melalui cara-cara konvensional seperti pemilihan umum, kampanye politik, atau keanggotaan dalam partai politik, maupun melalui bentuk-bentuk nonkonvensional seperti protes, demonstrasi, atau aktivisme online (Baharuddin et al., 2021, 2022; Gil de Zúñiga et al., 2014; Theocharis et al., 2023). Ini mencakup beragam aktivitas yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan sistem politik (Getachew & Beshah, 2019; Jennings et al., 2021; Larreguy & Liu, 2023). Partisipasi politik tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan aspirasi dan nilai-nilai demokrasi (Geise et al., 2021; Kitanova, 2020; Pratiwi et al., 2023).

Partisipasi politik dalam konteks pemilihan umum mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh warga negara untuk memengaruhi hasil pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta aktif dalam proses politik (Arniti, 2020; Baharuddin et al., 2023; Jubba et al., 2023). Ini termasuk pencalonan sebagai kandidat, kampanye politik, memberikan suara, dan mengawasi jalannya pemilihan (Al-Billeh & Issa, 2023; Luth et al., 2023; Yahya et al., 2024). Partisipasi politik dalam pemilihan umum merupakan fondasi dari sistem demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik untuk memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan mereka dan memengaruhi arah kebijakan publik (Matthews, 2021; Nguyen & Nguyen, 2023; Wong & Wong, 2022).

Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi politik cenderung meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran politik dan kepentingan publik terhadap proses politik (Baharuddin & Purwaningsih, 2017). Faktor-faktor seperti pentingnya pemilihan dalam menentukan arah kebijakan publik, persaingan antar kandidat yang kuat, serta kampanye politik yang intensif sering kali membangkitkan minat dan motivasi warga untuk turut serta dalam pemilihan (Bram, 2023; Nyawo, 2023). Selain itu, semakin meningkatnya akses informasi dan penyebaran teknologi komunikasi yang memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan luas antara kandidat dan pemilih juga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum (Yahya et al., 2024). Pendekatan teknologi ini juga mulai banyak di adopsi di Indonesia, salah satunya dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Dalam konteks Indonesia, Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data hasil pemilihan umum secara resmi. Keterlibatan Sirekap dalam proses pemilihan umum secara tidak langsung dapat mempengaruhi partisipasi politik. Dengan adanya sistem yang transparan dan akurat seperti Sirekap, pemilih cenderung lebih percaya pada integritas dan

keabsahan proses pemilihan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilihan umum dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif, karena warga merasa bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar dan hasilnya akan tercermin secara akurat dalam hasil pemilihan. Sebaliknya, jika terjadi keraguan atau kecurigaan terhadap integritas sistem seperti Sirekap, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan dan menghambat partisipasi politik (Gauru et al., 2022; Hardiyanti et al., 2022).

Meskipun Sirekap memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum, penggunaannya juga mendapatkan beberapa kritikan. Salah satu kritik utama adalah terkait dengan keamanan dan kerentanan terhadap manipulasi data (Pradesa, 2024). Kritik ini muncul karena adanya kekhawatiran akan potensi akses ilegal atau penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari dalam maupun luar lembaga pemilihan. Selain itu, kritik juga mengarah pada isu keandalan dan keakuratan data yang disajikan oleh Sirekap, terutama dalam konteks penghitungan suara yang transparan dan adil. Kritik lainnya mencakup kurangnya transparansi dalam proses penggunaan dan pengelolaan Sirekap serta keterbatasan akses informasi bagi masyarakat umum terkait dengan mekanisme kerja sistem tersebut. Dengan demikian, sementara Sirekap dapat menjadi alat yang bermanfaat, penting untuk terus memperbaiki dan mengatasi tantangan serta kritik yang muncul untuk memastikan integritas dan keandalan dalam proses pemilihan umum.

Meskipun telah ada banyak penelitian tentang partisipasi politik dan penggunaan teknologi dalam konteks pemilihan umum, masih ada kekurangan dalam pemahaman tentang dampak spesifik dari sistem seperti Sirekap terhadap motivasi dan perilaku pemilih. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap, bagaimana persepsi mereka terhadap transparansi dan keakuratan data yang disajikan, serta bagaimana kritik terhadap sistem tersebut dapat diatasi atau diperbaiki. Selain itu, penelitian juga dapat menggali bagaimana penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam partisipasi politik, terutama di kalangan masyarakat yang mungkin kurang terlayani atau kurang representatif secara tradisional. Dengan memahami gap penelitian ini, peneliti dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi di negara-negara berkembang.

## **Metode**

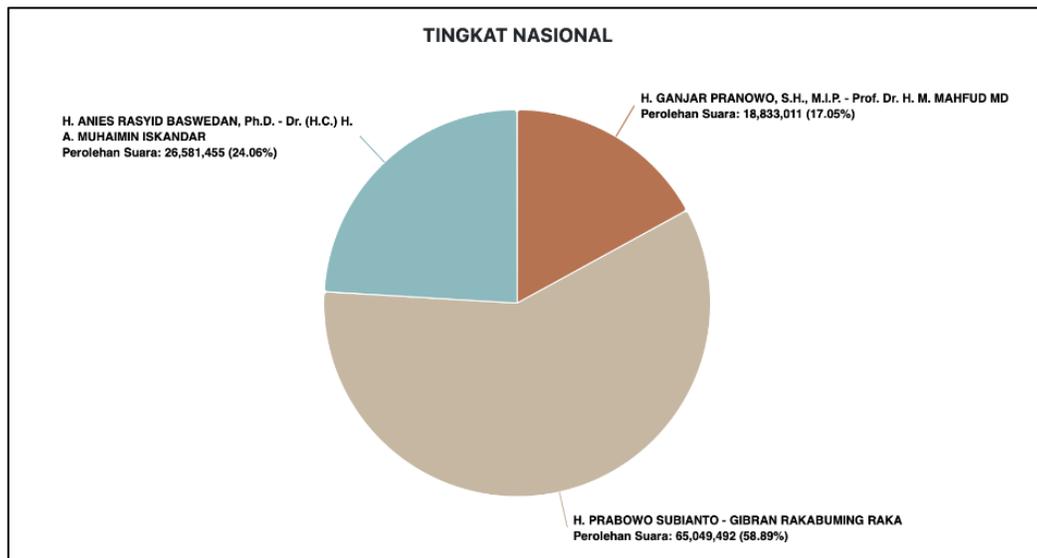
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah *Online Research Methodology* (ORM), yang mengandalkan sumber data dari informasi yang tersedia di internet (Harricharan & Bhopal, 2014). Peneliti menggunakan mesin pencari Google dengan

kata kunci "Sirekap" untuk mengumpulkan data yang relevan terkait dengan penggunaan sistem informasi tersebut dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Kemudian, alat analisis yang digunakan adalah Nvivo 12 Plus, sebuah perangkat lunak kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengelola, menyusun, dan menganalisis data secara sistematis. Dengan menggunakan Nvivo 12 Plus, peneliti dapat melakukan analisis teks yang mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi pola-pola, tren, dan temuan penting terkait dengan penggunaan Sirekap dalam partisipasi politik masyarakat.

Metode penelitian ORM ini memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber data yang tersedia secara luas di internet, sehingga memperluas cakupan penelitian dan memungkinkan pengumpulan data secara efisien. Namun, perlu diingat bahwa dalam menggunakan sumber data dari internet, peneliti perlu mempertimbangkan keabsahan dan keandalan informasi yang ditemukan serta memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan memanfaatkan Nvivo 12 Plus sebagai alat analisis, peneliti dapat mengorganisir data dengan lebih efektif, mengeksplorasi hubungan antara berbagai tema atau konsep, dan menemukan pola-pola yang mungkin tidak terdeteksi secara manual. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak penggunaan Sirekap dalam partisipasi politik di Indonesia.

### **Hasil dan Pembahasan**

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, untuk tidak menghentikan penayangan data perolehan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam proses pemilihan umum (Pirnando, 2024). Langkah tersebut memperlihatkan kesadaran akan pentingnya akses informasi bagi publik untuk memantau dan memverifikasi hasil pemilihan secara langsung. Dengan mempertahankan penayangan Sirekap, KPU memungkinkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pemantauan proses pemilihan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap integritas dan keabsahan hasil pemilu. Tindakan ini juga mencerminkan semangat untuk membangun sistem demokratis yang lebih terbuka dan akuntabel, di mana partisipasi publik diakui sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan demokrasi.

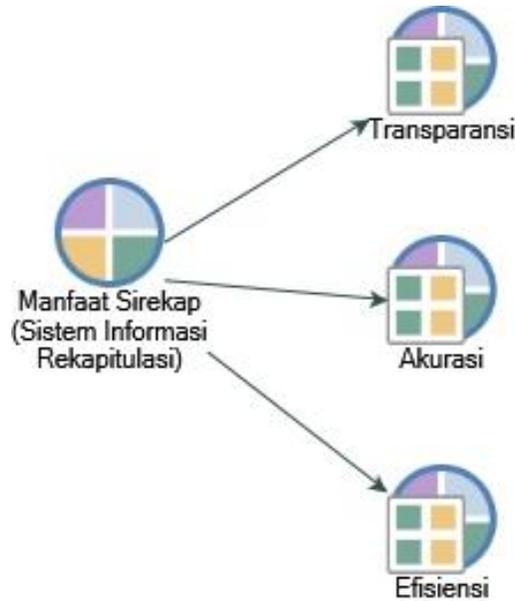


**Gambar 1.** Tampilan Sirekap Pilpres 2024.

Keputusan tersebut juga merupakan respons terhadap kekhawatiran dan kritik yang muncul terkait dengan integritas dan transparansi proses pemilihan umum. Dengan mempertahankan penayangan data perolehan suara melalui Sirekap, KPU menunjukkan komitmennya untuk menanggapi dan mengatasi kekhawatiran masyarakat secara langsung, serta untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan jujur dan adil. Langkah ini dapat membantu mengurangi potensi terjadinya spekulasi atau tuduhan tentang manipulasi hasil pemilihan, serta meningkatkan legitimasi dan penerimaan hasil pemilu oleh publik secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam sistem demokratis, tetapi juga merupakan langkah penting menuju proses pemilihan umum yang lebih terpercaya dan inklusif.

Komitmen KPU untuk terus menayangkan data perolehan suara melalui Sirekap juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan verifikasi secara mandiri terhadap hasil pemilu. Dengan akses yang terbuka terhadap informasi tersebut, masyarakat dapat menggunakan data yang tersedia untuk membandingkan dan memverifikasi hasil pemilihan dengan pengalaman dan observasi mereka sendiri, serta dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Hal ini dapat memperkuat kontrol sosial terhadap proses pemilihan umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi integritas dan keabsahan pemilu. Dengan demikian, langkah KPU untuk menjaga transparansi melalui penayangan Sirekap tidak hanya menjadi bagian integral dari

upaya untuk memperkuat demokrasi, tetapi juga merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan antara lembaga pemilihan dan masyarakat.

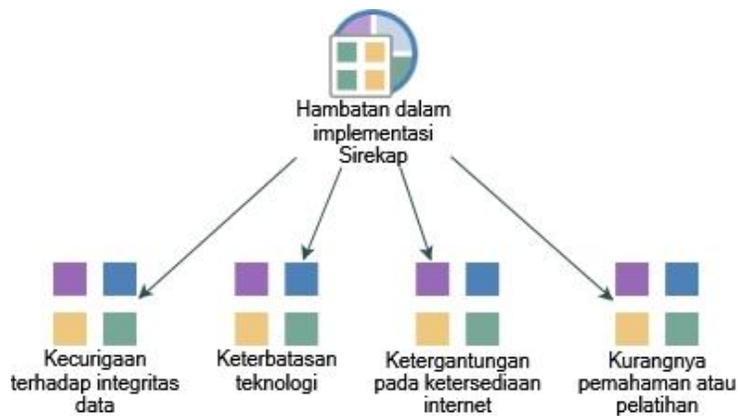


**Gambar 2.** Manfaat umum penggunaan Sirekap.

Penggunaan Sirekap memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses pemilihan umum (Pradesa, 2024). Pertama, Sirekap memperkuat transparansi dengan menyediakan akses publik terhadap data rekapitulasi suara secara langsung. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memverifikasi hasil pemilihan dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan terhadap integritas proses pemilu. Dengan demikian, Sirekap membantu mendorong partisipasi publik dalam pemantauan proses demokratis, yang merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan demokrasi.

Kedua, Sirekap meningkatkan akurasi data dengan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses rekapitulasi suara. Dengan data langsung diambil dari formulir C1 yang diisi oleh petugas KPPS di TPS, Sirekap meminimalkan potensi kesalahan dalam penginputan data, sehingga menghasilkan data yang lebih konsisten dan akurat. Akurasi data yang ditingkatkan ini memungkinkan KPU untuk menghasilkan hasil pemilihan yang lebih andal dan diakui secara luas, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, Sirekap membantu memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap proses pemilihan umum, yang merupakan landasan bagi pembangunan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Meskipun Sirekap menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses pemilihan umum, aplikasi ini masih diragukan oleh sebagian masyarakat, terutama dalam periode pemilu 2024. Kekhawatiran dan keraguan muncul karena adanya laporan tentang kesalahan dan ketidaksesuaian data antara yang direkam oleh Sirekap dengan data manual pada Formulir C1, serta perbedaan mencolok antara data penghitungan suara Pilpres yang ditampilkan di situs web resmi KPU dengan data manual pada Formulir C1. Temuan-temuan ini memicu pertanyaan serius tentang keandalan dan integritas Sirekap sebagai sistem rekapitulasi suara. Keraguan masyarakat terhadap Sirekap menggambarkan pentingnya untuk terus meningkatkan transparansi, akurasi, dan kepercayaan dalam penggunaan teknologi dalam proses pemilihan umum, serta perlunya tindakan yang tepat untuk menanggapi keprihatinan yang muncul agar proses pemilihan umum dapat tetap dijalankan dengan integritas dan keadilan yang tinggi.



**Gambar 3.** Beberapa hambatan dalam implementasi Sirekap.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi Sirekap adalah kecurigaan terhadap integritas data yang muncul akibat perbedaan antara data yang direkam oleh Sirekap dengan data manual pada Formulir C1, serta perbedaan mencolok antara data penghitungan suara yang ditampilkan di situs web resmi KPU dengan data manual pada Formulir C1. Kecurigaan ini telah menciptakan keraguan yang signifikan terhadap keandalan dan integritas Sirekap sebagai sistem rekapitulasi suara. Ketersembunyian akan kredibilitas sistem ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan umum secara keseluruhan, serta menyulitkan upaya untuk membangun kepercayaan terhadap integritas hasil pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi hambatan ini dengan mengadopsi tindakan yang transparan dan memperbaiki ketidaksesuaian data untuk memastikan keandalan Sirekap dalam memfasilitasi proses pemilihan umum yang adil dan terpercaya.

Keterbatasan teknologi atau infrastruktur seperti Internet di beberapa daerah juga merupakan salah satu hambatan dalam implementasi Sirekap. Meskipun Sirekap memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemilihan umum, namun keberhasilannya tergantung pada ketersediaan teknologi yang memadai. Di daerah-daerah yang masih memiliki akses internet terbatas atau tidak stabil, serta infrastruktur teknologi yang kurang berkembang, pengumpulan, pengiriman, dan pengolahan data oleh Sirekap dapat terganggu atau tertunda. Keterbatasan ini dapat menghambat kelancaran proses rekapitulasi suara secara tepat waktu dan akurat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi integritas dan keandalan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi keterbatasan teknologi ini dengan meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi Sirekap secara efektif di seluruh wilayah.

Kurangnya pemahaman atau pelatihan yang memadai terkait dengan penggunaan Sirekap di tingkat TPS merupakan tantangan serius dalam implementasi sistem ini. Kesalahan dalam penginputan data atau penggunaan sistem secara umum dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang cara kerja Sirekap dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini dapat mengurangi akurasi dan keandalan data yang dihasilkan, sehingga berpotensi memengaruhi integritas proses pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas KPPS melalui pelatihan yang komprehensif tentang penggunaan Sirekap. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang fitur-fitur sistem, prosedur penginputan data yang benar, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul. Dengan demikian, pemahaman dan keterampilan yang ditingkatkan akan membantu memastikan penggunaan Sirekap secara efektif dan menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan dalam proses pemilihan umum.

Implementasi Sirekap sebagai sistem rekapitulasi suara dalam proses pemilihan umum menghadapi beberapa hambatan yang signifikan, termasuk kecurigaan terhadap integritas data, keterbatasan teknologi atau infrastruktur di beberapa daerah, serta kurangnya pemahaman atau pelatihan yang memadai di tingkat TPS. Kecurigaan terhadap integritas data dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan umum secara keseluruhan, sementara keterbatasan teknologi dapat menghambat kelancaran dan akurasi pengumpulan serta pengolahan data oleh Sirekap. Di sisi lain, kurangnya pemahaman atau pelatihan terkait dengan penggunaan Sirekap dapat menyebabkan kesalahan dalam penginputan data, mengancam akurasi dan keandalan hasil pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan ini dengan mengadopsi tindakan yang transparan, meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil, serta

memberikan pelatihan yang komprehensif kepada petugas KPPS. Dengan demikian, implementasi Sirekap dapat berjalan dengan lebih efektif, memastikan integritas dan keandalan proses pemilihan umum untuk mewujudkan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi Sirekap dapat memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi politik masyarakat. Kecurigaan terhadap integritas data dan keandalan Sirekap sebagai sistem rekapitulasi suara dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan umum secara keseluruhan. Hal ini dapat menghasilkan rasa skeptisisme terhadap hasil pemilihan dan mendorong beberapa individu untuk menarik diri dari proses politik, merasa bahwa suara mereka tidak akan dihitung dengan benar atau bahwa prosesnya tidak adil. Keterbatasan teknologi atau infrastruktur, seperti ketersediaan internet yang terbatas di beberapa daerah, juga dapat menghambat partisipasi politik dengan menghalangi akses yang adil dan setara terhadap informasi dan proses politik.

Individu yang tinggal di daerah dengan akses internet terbatas mungkin kesulitan untuk memperoleh informasi yang relevan atau untuk terlibat secara aktif dalam diskusi politik online atau pemantauan proses pemilihan. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan memperbaiki integritas dan transparansi Sirekap serta meningkatkan akses teknologi di seluruh wilayah. Dengan demikian, dapat memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan memengaruhi arah kebijakan publik.

Selain itu, kurangnya pemahaman atau pelatihan yang memadai terkait dengan penggunaan Sirekap juga dapat memengaruhi partisipasi politik. Jika petugas KPPS tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara kerja Sirekap atau prosedur yang harus diikuti dalam penggunaannya, maka hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penginputan data atau pengolahan informasi yang akhirnya mengurangi akurasi dan keandalan hasil pemilihan. Ketidakpastian mengenai keandalan data yang dihasilkan oleh Sirekap dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada proses politik dan menghasilkan ketidakpuasan terhadap sistem demokratis secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas KPPS tentang penggunaan Sirekap serta memastikan bahwa prosedur penginputan data dilakukan dengan benar dan akurat. Dengan demikian, dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dan memperkuat integritas proses pemilihan umum, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan berarti dari seluruh spektrum masyarakat.

Untuk menjaga partisipasi politik ke depannya, perlu dilakukan upaya yang holistik dan inklusif. Pertama, penting untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik, termasuk dalam penggunaan teknologi seperti Sirekap, agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap integritas sistem dan hasil pemilihan. Selanjutnya, diperlukan investasi dalam peningkatan akses teknologi dan literasi digital di seluruh wilayah untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur internet dan memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu, pelatihan yang memadai bagi petugas KPPS dan pendidikan politik yang komprehensif bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik dan proses pemilihan, serta untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dan berdampak. Dengan demikian, melalui upaya-upaya ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain transparansi dan literasi digital, akses publik yang lebih luas juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menjaga partisipasi politik ke depannya. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa informasi politik tersedia secara merata dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau terpinggirkan. Ini dapat dicapai melalui pengembangan infrastruktur komunikasi yang lebih baik, seperti penyediaan akses internet yang terjangkau dan luas, serta melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan politik yang menjangkau berbagai kalangan, termasuk yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Dengan meningkatkan akses publik terhadap informasi politik, maka dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan demokratis, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan memengaruhi arah kebijakan publik.

Secara keseluruhan, pengembangan inovasi dalam Sirekap menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan kehandalan sistem dalam proses pemilihan umum di masa depan. Inovasi ini bisa meliputi pengembangan fitur-fitur baru yang memperbaiki transparansi, akurasi, dan keamanan data, serta peningkatan dalam integrasi dengan teknologi yang ada untuk memastikan ketersediaan sistem di berbagai kondisi infrastruktur, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, memperhatikan umpan balik dari pengguna dan memperbaiki antarmuka pengguna menjadi kunci untuk memastikan Sirekap lebih mudah digunakan oleh petugas KPPS serta meminimalkan kesalahan manusia dalam penginputan data. Dengan terus melakukan pengembangan inovasi yang berkelanjutan, Sirekap memiliki potensi untuk menjadi alat yang lebih kuat dalam mendukung proses demokratis dan meningkatkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan bermakna bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## Kesimpulan

Temuan ini menyoroti pentingnya menjaga transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum, terutama melalui penggunaan teknologi seperti Sirekap. Meskipun kekhawatiran terhadap integritas data dan keandalan Sirekap telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, langkah-langkah yang diambil oleh KPU untuk tetap menyangkan data perolehan suara melalui Sirekap menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan responsif terhadap keprihatinan yang muncul. Namun, tantangan-tantangan seperti keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman atau pelatihan, serta akses publik yang terbatas tetap menjadi hambatan dalam memastikan partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang holistik, termasuk inovasi dalam Sirekap, peningkatan akses teknologi, pendidikan politik yang lebih luas, dan peningkatan akses publik terhadap informasi politik, untuk memastikan bahwa partisipasi politik tetap menjadi hak yang dijamin bagi seluruh warga Indonesia.

Dalam konteks ini, pengembangan inovasi dalam Sirekap menjadi krusial untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Dengan terus meningkatkan transparansi, akurasi, dan keamanan data, Sirekap memiliki potensi untuk menjadi alat yang kuat dalam mendukung partisipasi politik yang lebih inklusif dan berarti bagi semua warga Indonesia. Namun, upaya ini harus didukung oleh peningkatan akses teknologi, pendidikan politik yang lebih luas, dan upaya untuk memastikan bahwa informasi politik tersedia secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, maka akan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Al-Billeh, T., & Issa, H. A. (2023). Jordanian Women's Political Participation in The Nineteenth Parliament Elections (2020): The Beginning of the Political Rise of Jordanian Women? *Dirasat: Human and Social Sciences*, 50(5), 244–255. <https://doi.org/10.35516/hum.v50i5.961>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205–237. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4176>
- Baharuddin, T., Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2023). Form of Capital in Elections: Candidate Victory over Political Economy Domination. *The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies*, 18(1), 77–96. <https://doi.org/10.18848/2327->

0071/CGP/v18i01/77-96

- Baharuddin, T., Sairin, S., Qodir, Z., Jubba, H., & Nurmandi, A. (2022). Partisipasi dan kepercayaan sosial daring: kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 6(1), 277–290. <https://doi.org/10.25139/jsk.v6i1.3680>
- Baharuddin, T., Salahudin, S., Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Kampanye Antikorupsi Kaum Muda melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 58–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3827>
- Bram, C. (2023). The Most Important Election of Our Lifetime: Focalism and Political Participation. *Political Psychology*, 44(5), 943–960. <https://doi.org/10.1111/pops.12868>
- Gauru, C. C., Martini, R., & Alfirdaus, L. K. (2022). Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang. *REFORMASI Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi*, 12(2), 224–230. <https://doi.org/https://10.33366/rfr.v%vi%i.3874>
- Geise, S., Heck, A., & Panke, D. (2021). The Effects of Digital Media Images on Political Participation Online: Results of an Eye-Tracking Experiment Integrating Individual Perceptions of “Photo News Factors.” *Policy and Internet*, 13(1), 54–85. <https://doi.org/10.1002/poi3.235>
- Getachew, A., & Beshah, T. (2019). The Role of Social Media in Citizen’s Political Participation. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, 558, 487–496. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-20671-0\\_33](https://doi.org/10.1007/978-3-030-20671-0_33)
- Gil de Zúñiga, H., Molyneux, L., & Zheng, P. (2014). Social media, political expression, and political participation: Panel analysis of lagged and concurrent relationships. *Journal of Communication*, 64(4), 612–634. <https://doi.org/10.1111/jcom.12103>
- Hardiyanti, M., Praditya Arcy Pratama, Aura Diva Saputra, Mila Mar’atus Sholehah, & M. Rizieq Aditya R. (2022). Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Journal Equitable*, 7(2), 249–271. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>
- Harricharan, M., & Bhopal, K. (2014). Using blogs in qualitative educational research: an exploration of method. *International Journal of Research and Method in Education*, 37(3), 324–343. <https://doi.org/10.1080/1743727X.2014.885009>
- Jennings, F. J., Suzuki, V. P., & Hubbard, A. (2021). Social Media and Democracy: Fostering Political Deliberation and Participation. *Western Journal of Communication*, 85(2), 147–167. <https://doi.org/10.1080/10570314.2020.1728369>
- Jubba, H., Baharuddin, T., Qodir, Z., & Iribaram, S. (2023). Sentiment Analysis : Predicting the Position of Islamic Political Parties in Indonesia in the Next Election. *International Congress on Information and Communication Technology*, 1027–1034. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-99-3091-3\\_84](https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-99-3091-3_84)
- Kitanova, M. (2020). Youth political participation in the EU: evidence from a cross-national

- analysis. *Journal of Youth Studies*, 23(7), 819–836. <https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1636951>
- Larreguy, H., & Liu, S. X. (2023). When does education increase political participation? Evidence from Senegal. *Political Science Research and Methods*, 2023. <https://doi.org/10.1017/psrm.2023.37>
- Luth, Maswati, R., & Baharuddin, T. (2023). Online political trust in Anies Baswedan as a candidate for the President of Indonesia 2024. In *Environmental Issues and Social Inclusion in a Sustainable Era* (pp. 317–322). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003360483-36>
- Matthews, F. (2021). The value of ‘between-election’ political participation: Do parliamentary e-petitions matter to political elites? *British Journal of Politics and International Relations*, 23(3), 410–429. <https://doi.org/10.1177/1369148120959041>
- Nguyen, T. T. N., & Nguyen, T. P. (2023). The political participation of local citizen in the elections of local leaders in Vietnam. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2022-0008>
- Nyawo, S. (2023). Religio-cultural beliefs and women’s political participation: Gender dimensions in post-constitutional elections in Eswatini. *Religion and Inequality in Africa*, May, 97–108.
- Pirnando, T. (2024, February 24). KPU Tak Akan Setop Penayangan Sirekap. *Sinpo.Id*. <https://sinpo.id/detail/67550/kpu-tak-akan-setop-penayangan-sirekap>
- Pradesa, I. A. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(4), 47–57.
- Pratiwi, M. A., Putri, R. A., & Mahadiansar, M. (2023). Political Participation and Socioeconomic Status (SES) the Governor Election in Kepulauan Riau. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 731–739. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2649>
- Theocharis, Y., Boulianne, S., Koc-Michalska, K., & Bimber, B. (2023). Platform affordances and political participation: how social media reshape political engagement. *West European Politics*, 46(4), 788–811. <https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2087410>
- Wong, M. Y. H., & Wong, S. H. W. (2022). Income Inequality and Political Participation: A District-Level Analysis of Hong Kong Elections. *Social Indicators Research*, 162(3), 959–977. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02863-9>
- Yahya, M., Syukri, S., Syarif, A., Arni, A., Manggaga, I. P., & Baharuddin, T. (2024). Twitter and Online Trust: Ganjar Pranowo and Anies Baswedan Towards the 2024 Presidential Election. *Nyimak: Journal of Communication*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v8i1.8730>